

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

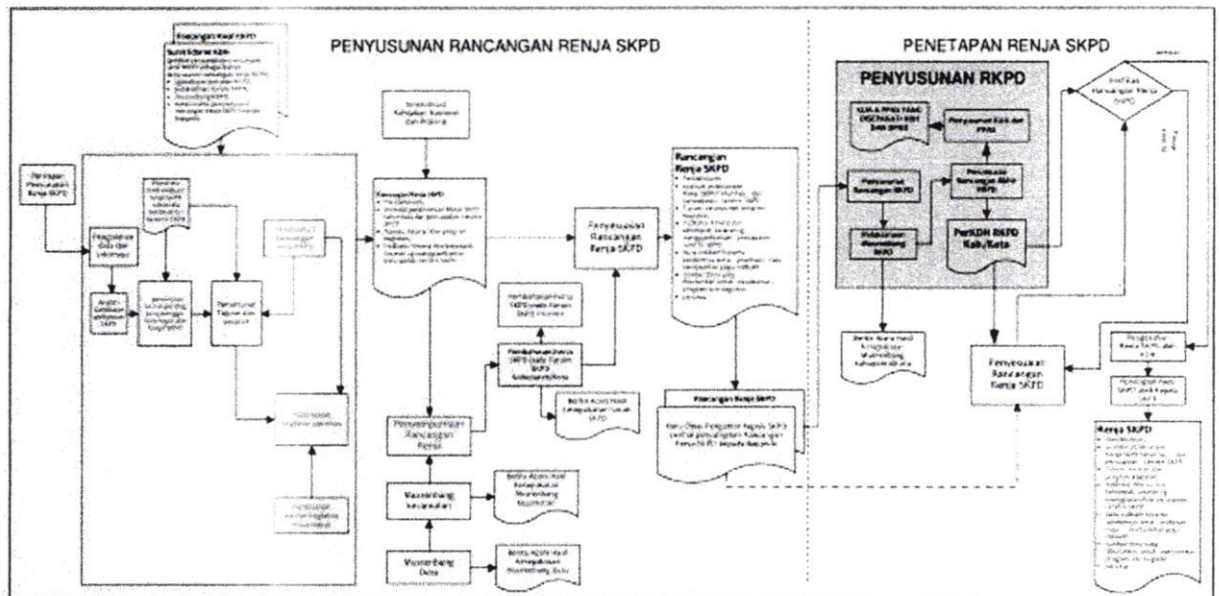
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif
3. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



2

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
 - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan PD
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan
 - Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
 - Telaah terhadap rancangan RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - Perumusan kegiatan prioritas Rencana Kerja
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
 - Penyempurnaan rancangan kerja PD
 - Pembahasan forum PD
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
3. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
4. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
5. Penetapan Renja

Pada perencanaan tahun 2025 ini telah dirintis penggunaan aplikasi SIPD dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025. Implementasi aplikasi SIPD merupakan wujud perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sehingga diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

Adapun Agenda Kerja yang telah dilalui dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMPTSP
Kab. Purworejo Tahun 2025**

NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Persiapan Penyusunan	Minggu ke-2 November 2023
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Minggu ke-1 Desember 2023
3.	Forum Perangkat Daerah	Minggu ke-2 Februari 2024
4.	Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Minggu ke-1 Maret 2024
5.	Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Maret 2024
6.	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Juli 2024
7.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Juli 2024
8.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Akhir Juli 2024

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah karena Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mana RKPD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2016 – 2023 dan mempedomani Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14 seri e nomor 8);
17. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
18. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (seri D nomor 44).
19. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 74 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 (seri E nomor 21);

20. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 9)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam Rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
2. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.
4. Menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2025.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
3. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2025.
4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.

5. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penulisan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Renja dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renja tahun lalu atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Capaian hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2023, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Periode Pelaksanaan: Tahun 2023**

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program (outcome) / Kegiatan (output/Sub Kegiatan)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					5		6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 13 / 5 * 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	Peningkatan Nilai Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	10	5.298.000.000		1.440.120.049		799.947.900	0	95.612.246	0	289.821.226	0	91.839.384	50,86	291.877.296		769.150.152		2.209.270.201		41,7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Realisasi Penanaman Modal	Milliar	412,91	5.298.000.000		1.440.120.049	74,4	799.947.900	0	95.612.246	0	289.821.226	0	91.839.384	112,255	291.877.296	112,255	769.150.152	112,255	2.209.270.201	27,19	41,7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%	5	807.000.000		228.177.900	5	49.811.500	0	1.680.000	0	21.682.400	0	14.013.266	5	6.972.600	5	44.348.266	5	272.526.166	100	33,77	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen	5	589.000.000	0	228.177.900	1	46.011.500	0	1.680.000	0	20.326.400	0	14.013.266	1	5.923.400	1	41.943.066	1	270.120.966	20	45,86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	5	549.000.000	1	228.177.900	1	46.011.500	1.680.000	20.326.400	14.013.266	1	5.923.400	1	41.943.066	2	270.120.966	40	49,2				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	30	40.000.000																			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen	3	218.000.000	0		1	3.800.000	0	0	1.356.000	0		1	1.049.200	1	2.405.200	1	2.405.200	33,33	1,1		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	117.000.000																			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang uliah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	3	101.000.000			1	3.800.000			1.356.000	0	1	1.049.200	1	2.405.200	1	2.405.200	33,33	2,38			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	%	99,5	757.000.000		194.559.081	99,5	56.211.700	25	16.599.030	50	8.601.993	75	7.334.527	24,5	16.429.416	24,5	48.964.966	24,5	243.524.047	24,62	32,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%	99,5	757.000.000		194.559.081	99,5	56.211.700	25	16.599.030	50	8.601.993	75	7.334.527	100	16.429.416	100	48.964.966	100	243.524.047	100	32,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	369.900.000	1	58.454.000	1	10.000.000	2.117.000	2.315.880	2.944.000	1	0	1	7.376.880	2	65.830.880	40	17,8				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	387.100.000	1	136.105.081	1	46.211.700	14.482.030	6.286.113	4.390.527	1	16.429.416	1	41.588.086	2	177.693.167	40	45,9				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100	1.572.000.000	483.780.945	100	294.662.100	100	66.178.667	100	95.501.661	100	50.026.975	100	77.951.101	100	289.658.404	100	773.439.349	100	49,2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	%	100	1.572.000.000	483.780.945	100	294.662.100	25	66.178.667	50	95.501.661	75	50.026.975	100	77.951.101	100	289.658.404	100	773.439.349	100	49,2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	10.000	498.000.000	500	325.350.277	2.500	189.683.200	8.814	41.727.395	11.614	58.314.001	11.614	30.195.459	14.460	56.098.085	14.460	186.334.940	14.460	511.685.217	100	102,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	150	398.000.000	10	121.786.218	30	99.985.900	21	22.576.272	36	36.569.660	36	19.831.516	28	19.385.516	28	98.362.964	28	220.149.182	18,67	55,31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	150	338.000.000	10	12.913.000	30	2.493.000	10	1.875.000	0	618.000	0	0	220	0	230	2.493.000	240	15.406.000	100	4,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	200	338.000.000	30	23.731.450	40	2.500.000			20		0	40	2.467.500	60	2.467.500	90	26.198.950	45	7,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK	%	100	1.665.000.000	384.432.379	100	366.700.000	0	7.852.000	100	151.700.000	100	10.996.000	100	184.339.800	100	354.887.800	100	739.320.179	100	44,4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	%	500	1.665.000.000	384.432.379		366.700.000	25	7.852.000	50	151.700.000	75	10.996.000	100	184.339.800	100	354.887.800	100	739.320.179	20	44,4		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	40	1.166.000.000	8	367.368.579	249	337.630.808	80	7.852.000	40	151.700.000	40	9.068.000	520	157.605.200	520	326.225.200	520	693.593.779	100	59,48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	1.245	499.000.000	49	17.063.800	8	29.069.192					1.928.000	20	26.734.600	20	28.662.600	69	45.726.400	100	9,16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																							
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																							
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	%	100	497.000.000	149.169.744	100	32.562.600	25	3.302.549	50	12.335.172	75	9.468.616	100	6.184.379	100	31.290.716	100	180.460.460	100	36,31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data Informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Dokumen	5	497.000.000	0	149.169.744	4	32.562.600	0	3.302.549	0	12.335.172	0	9.468.616	4	6.184.379	4	31.290.716	4	180.460.460	80	36,31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	20	497.000.000		149.169.744	4	32.562.600	1	3.302.549	1	12.335.172	0	9.468.616	2	6.184.379	4	31.290.716	4	180.460.460	20	36,31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	88	12.573.443.898		5.453.574.400		3.000.355.376	0	510.027.857	0	715.109.242	0	513.260.502	96,36	530.956.767		2.269.354.368	4	7.722.928.768	4,55	61,42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	88	12.573.443.898		5.453.574.400	88	3.000.355.376	0	510.027.857	0	715.109.242	0	513.260.502	96,36	530.956.767	96,36	2.269.354.368	96,36	7.722.928.768	100	61,42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100	12.573.443.898	5.453.574.400	100	3.000.355.376	25	510.027.857	50	715.109.242	75	513.260.502	100	530.956.767	100	2.269.354.368	100	7.722.928.768	100	61,42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen</i>	35	120.575.725	0	19.740.400	7	12.411.000	3	9.465.000	3	2.946.000	0	1	1	12.411.000	1	32.151.400	2,86	26,66	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	80	32.051.775	3	5.249.000	15	12.411.000	2	9.465.000	6	2.946.000	0	0	7	0	15	12.411.000	18	17.660.000	22,5	55,1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	9.157.650	1	1.499.800												1	1.499.800	20	16,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	9.157.650	1	1.499.800												1	1.499.800	20	16,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	12.210.200		2.000.000													2.000.000		16,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	12.210.200	1	2.000.000												1	2.000.000	20	16,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	80	15.262.750		2.499.800													2.499.800		16,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25	90.525.500		4.992.000													4.992.000		16,35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	10.594.417.734	1.836.993.696	100	2.192.402.012	25	332.995.511	50	508.803.165	25	322.792.349	100	325.820.087	100	1.490.411.112	100	3.327.404.808	100	31,41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	10.455.392.397	19	1.814.461.369	16	2.176.066.544	16	329.056.925	16	504.690.030	16	318.749.933	16	321.788.708	16	1.474.285.596	16	3.288.746.965	84,21	31,46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	30	12.210.200	3	1.960.400												3	1.960.400	10	16,06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	120	114.604.937	12	18.592.527	24	16.335.468	2	3.938.586	10	4.113.135	0	4.042.416	12	4.031.379	24	16.125.516	36	34.718.043	30	90,29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	12.210.200	1	1.979.400												1	1.979.400	10	16,21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	177.047.900	28.979.800														28.979.800		16,37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	177.047.900	19	28.979.800												19	28.979.800	19	16,37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	866.926.642	192.103.423	100	165.000.400	25	47.613.930	50	50.099.678	25	37.522.668	100	29.608.619	100	164.844.895	100	356.948.318	100	41,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	866.926.642	192.103.423	1	165.000.400		47.613.930		50.099.678		37.522.668	1	29.608.619	1	164.844.895	2	356.948.318	40	41,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Didakan	Jenis	5		2.927.337.114														2.927.337.114			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0																		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	905	0	2.927.337.114													25	2.927.337.114	2,76		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	15	440.876.744	341.905.040	3	534.551.864	0	96.986.442	0	130.646.223	0	126.869.838	1	160.327.069	1	514.829.572	1	856.734.612	6,67	194,33	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	143.375.221	23.477.500	1	24.963.500		9.065.400		3.757.100		10.223.300	1	366.000	1	23.411.800	2	46.889.300	40	32,7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	186.205.550	126.263.516	1	179.596.164		40.000.837		41.089.696		37.283.422	1	42.236.890	1	160.610.845	2	286.874.361	40	154,06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	111.295.973	192.164.024	1	335.992.200		47.920.205		85.799.427		79.363.116	1	117.724.179	1	330.806.927	2	522.970.951	40	469,39	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis	6	373.599.153	106.514.927	2	95.990.100	0	22.966.974	0	22.614.176	0	26.075.647	2	15.200.992	2	86.857.789	2	193.372.716	33,33	51,76	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	218.480.772	59.343.548	8	55.990.100	2	12.726.974	4	11.581.180	4	8.336.600	8	15.200.992	8	47.845.746	8	107.189.294	100	49,06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80	155.118.381	47.171.379	96	40.000.000	48	10.240.000	60	11.032.996	60	17.739.047	96	0	96	39.012.043	96	86.183.422	100	55,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rata-rata capaian kinerja (%)																						87,44	130,49
Predikat Kinerja																						T	

h

Pada Tahun 2023, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 3.038.504.520 dari pagu RKPD sebesar 3.800.303.276 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 80,17%. Capaian kinerja sebesar angka tersebut diatas masih kurang memuaskan / maksimal, dikarenakan masih dibawah 90 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah;
2. Alokasi anggaran gaji untuk penambahan personil ASN yang tidak dapat terealisasi ;
3. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target kinerja program kegiatan yaitu perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Ada 44 (empat puluh empat) Perizinan yang dilayani yaitu :

NO	NAMA IZIN
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
4	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
5	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
6	IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH MILIK PMI
7	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAHRAGA
8	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
9	IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
10	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
11	IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
12	IZIN JAGAL HEWAN
13	IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS
14	IZIN LINGKUNGAN
15	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
16	PKL (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
17	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)
18	IZIN REKLAME
19	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
20	IZIN OPERASIONAL PANTI
21	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
22	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
23	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
23	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
24	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

25	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
26	IZIN OPERASIONAL KLINIK
27	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
28	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
29	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
30	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
31	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
32	SIK-ALM(IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK)
33	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
34	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
35	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
36	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
37	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS)
38	ISIPTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
39	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
40	IZIN KERJA DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIKOT&SIPOT)
41	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG (SIPPK)
42	IZIN KERJA TENAGA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIK-KESMAS)
43	IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD)
44	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)

Dalam melaksanakan pelayanan, DINPMPTSP telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

Standar Pelayanan Perizinan (SPP) ini memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder Kabupaten Purworejo khususnya pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya akan kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan di DPMPPTSP Kabupaten Purworejo. Sebagai tindak lanjut Standar

Pelayanan Perizinan (SPP), dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan adanya Standar Pelayanan ini diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melayani semua pemohon akan semakin mudah untuk dipantau, diawasi dan diukur oleh seluruh stakeholder sehingga secara penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi transparan dan akuntabel. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T-C. 30.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2022 (thn n-2)	Th. 2023 (thn n-2)	Th. 2024 (thn n-1)	Th. 2025 (thn n)	Th. 2023 (thn n-2)	Th. 2024 (thn n-1)	Th. 2025 (thn n)	Th. 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi		✓	10%	10%	10%	10%	95%	27%	111%	117%	
2	Realisasi Penanaman Modal	✓		67,65M	74,41M	81,85M	90M	139,2 M	20 M	91 M	105 M	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			88	88	88	88	96,36	88	88	88	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			88	88	88	88	88	88	88	88	
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		✓	5%	5%	5%	5%	5%	3%	5%	5%	
6	Program Promosi Penanaman Modal		✓	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	50%	100%	100%	
7	Program Pelayanan Penanaman Modal		✓	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		✓	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
9	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		✓	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		✓	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a. Telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik;
- b. Adanya Kegiatan Gebyar Perizinan;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SI IDA);
- d. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik;

KELEMAHAN (W):

- a. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
- b. Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
- c. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo;

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- a. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
- b. Teknologi informasi berkembang pesat;
- c. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;

- d. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

ANCAMAN (T):

- a. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
- b. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus sendiri perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
- c. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah di bidang investasi;
2. Belum optimalnya sinergitas OPD terkait dalam mendukung pengembangan iklim investasi.

2.4 Review terhadap RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.3
Reviu terhadap RKPD tahun 2025 Kabupaten Purworejo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	2.684.362.151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	2.401.379.700	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	17.924.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	8.427.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	4.375.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	8.427.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.904.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.015.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.740.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	1.775.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.375.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.821.174.251	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.545.902.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bu	1.794.274.251	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bu	1.520.142.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	26 Laporan	23.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	26 Laporan	23.400.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.750.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.360.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	140.275.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	140.275.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.275.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.275.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	542.088.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	588.897.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.859.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.859.250	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.273.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.082.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368.955.750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368.955.750	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	1 Jenis	102.900.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	1 Jenis	117.878.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.220.000	23

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	36.758.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 Unit	15000000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 Unit	15000000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	27.900.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	27.900.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERTUMBUHAN JUMLAH KEPERMINATAN PENANAMAN MODAL	5 %	81.893.720	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERTUMBUHAN JUMLAH KEPERMINATAN PENANAMAN MODAL	5 %	81.893.720	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	20.626.660	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	-	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 %	20.626.660	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	61.267.060	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	81.893.720	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	60.626.660	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	21.267.060	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	21.267.060	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE NOMOR INDUK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPEMINATAN	99,50%	277.716.990	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE NOMOR INDUK BERUSAHA YANG TERBIT TERHADAP JUMLAH KEPEMINATAN	99,50%	277.716.990	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,50%	277.716.990	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,50%	277.716.990	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	227.716.990	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	277.716.990	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	100%	313.325.550	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAYANAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK	100%	373.325.550	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	313.325.550	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	373.325.550	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	2.500.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	212.296.050	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	272.296.050	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	2.500.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Purworeja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	2.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	35 Kegiatan Usaha	96.029.500	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	35 Kegiatan Usaha	96.029.500	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK	100%	798.985.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMENUHI KETENTUAN NSPK	100%	798.985.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100%	798.985.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100%	798.985.000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	119.847.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	119.847.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	249 Pelaku Usaha	439.443.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	249 Pelaku Usaha	439.443.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 Kegiatan Usaha	239.695.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 Kegiatan Usaha	239.695.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	85.684.225	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	85.683.025	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	85.684.225	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	85.683.025	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	85.684.225	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	85.683.025	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam forum Perangkat daerah yang dilaksanakan pada bulan februari untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak ada. Sehingga pada tahun anggaran 2025 usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas PMPTSP tidak dianggarkan sesuai tabel 2.4

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Ada beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi perhatian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang – undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Arah kebijakan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Prioritas Penanaman Modal sektor pangan, infrastruktur, energi dan Green Investment;
4. Membangun kemitraan Penanaman Modal Usaha Besar dengan K-UMKM.

Dengan Strategi kebijakan Penanaman Modalnya yaitu :

1. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;

2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;
3. Penguatan Task Force untuk pembinaan dan pengembangan Penanaman Modal;
4. Pengembangan kawasan industri dengan pendekatan regionalisasi pengembangan wilayah;
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

3.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	10%
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	90 M
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88

3.4. Program dan Kegiatan

Detail Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat Pada Tabel 3.2.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. PURWOREJO
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
1	2	18	01				100 %	2.401.379.700,00							4.426.200.000,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
2	18	01	2.01				7 Dokumen	8.427.200,00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur		5.000.000,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2	18	01	2.01	0001			41 Dokumen	8.427.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
2	18	01	2.02				100 %	1.545.902.000,00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur		2.029.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2	18	01	2.02	0001			19 Orang/bulan	1.520.142.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur		2.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN														
2	18	01	2.02	0005			6 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
2	18	01	2.02	0007			24 Laporan	23.400.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
2	18	01	2.02	0008			2 Dokumen	1.360.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 %	140.275.500,00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur	-	142.000.000,00		
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-				1 Laporan	140.275.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur	-	142.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				3 Laporan	588.897.000,00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur	-	553.000.000,00		
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-				1 Laporan	22.859.250,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur	-	23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-				1 Laporan	197.082.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur	-	160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-				1 Laporan	368.955.750,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur	-	370.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-				4 Jenis	117.878.000,00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur	-	142.000.000,00		
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-				1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur	-	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-				8 Unit	36.758.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur	-	61.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1																					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur		16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				80 Unit	27.900.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	-				5 %	81.893.720,00							62.000.000,00		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				1 Dokumen	81.893.720,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat	-	62.000.000,00		
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60.626.660,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	21.267.060,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		62.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	-				100 %	277.716.990,00								278.000.000,00	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	-				100 %	277.716.990,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat	-	278.000.000,00		
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	277.716.990,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		278.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	-			100 %	373.325.550,00							320.200.000,00		
	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	-			100 %	373.325.550,00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat	-	320.200.000,00		
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah															
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		2.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik															
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2500 Pelaku Usaha	272.296.050,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		215.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko															
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				35 Pelaku Usaha	2.500.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		2.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko															
						Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				35 Kegiatan Usaha	96.029.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
5	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK	-			100 %	798.985.000,00							805.000.000,00		
	2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	-			100 %	798.985.000,00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat	-	805.000.000,00		
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				7 Kegiatan Usaha.	119.847.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				249 Pelaku Usaha	439.443.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		445.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				8 Kegiatan Usaha	239.695.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat		240.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
6	2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	-			100 %	85.683.025,00									90.000.000,00		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	-			1 Dokumen	85.683.025,00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat				90.000.000,00		
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	85.683.025,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Masyarakat				90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
J U M L A H																					4.426.200.000,00	

BUPATI PURWOREJO

YULI HASTUTI

3.5. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2025 sudah mendukung Pengarusutamaan gender yaitu pada Program Pelayanan Penanaman Modal pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 5% yang difokuskan pada penyusunan regulasi pengembangan iklim penanaman modal.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase ijin usaha dan/atau izin komersial/ izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal sebesar 99,5%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal dan pelaksanaan kegiatan promosi.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase layanan perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Pelayanan) sebesar 100% yang difokuskan pada penyediaan layanan perizinan sesuai SOP, penyuluhan perizinan pada masyarakat, serta didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan, serta koordinasi pemberian fasilitas/insentif. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi

Optimalisasi Mall Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam :

1. Penyedia sarana dan prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik
2. Pengendali kegiatan operasional dimana terdapat 24 gerai pelayanan yang terdiri dari Perangkat Daerah, Kementerian, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya.
3. Memberikan layanan konsultasi tentang perizinan dan penanaman modal untuk pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan sebesar 100% yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan penanaman modal.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi sebesar 100%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan serta pemeliharaan aplikasi perizinan selama 12 bulan. Rencana program dan pagu anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.401.379.700	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	81.893.720	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	277.716.990	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	373.325.550	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	798.985.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	85.683.025	
			4.018.983.985	

TABEL 4.2
SASARAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN

NO	PRGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terbitnya Nomor Induk Berusaha
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal

NO	PRGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Norma Standar Prosedur Dan Kriteria
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Nspk
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Renstra perangkat daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo ini telah disusun seoptimal mungkin dengan mempedomani :

1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2025 antara lain:

- a. Penyusunan RUPM pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Penyesuaian keluaran subkegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai juknis pelaksanaan DAK;
- c. Pada Program Promosi Penanaman Modal terdapat kegiatan untuk mendukung promosi penanaman modal guna menarik minat investor untuk berinvestasi di kabupaten purworejo;
- d. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat kegiatan Gebyar Pelayanan Perizinan dimana kegiatan ini sangat memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan.

2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

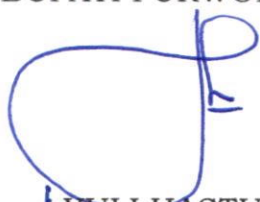
Kaidah pelaksanaan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2025 pada akhir tahun 2025;

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Rancangan Renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

♣ BUPATI PURWOREJO ♣

| YULI HASTUTI

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2025 pada akhir tahun 2025;

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Rancangan Renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

